

173 Perusahaan di Jabar Belum Bayar THR

BANDUNG (IM)-Dinas

Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dianakertrans) Jawa Barat menerima laporan sebanyak sebanyak 1.363 perusahaan telah bersedia membayar THR secara penuh dan tepat waktu. Namun, menurut Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan Disnakertrans Jabar, Joao De Araujo Dacosta, tahun ini masih ada perusahaan yang diadukan karena belum membayar THR.

"Hingga saat ini kami menerima pengaduan melalui website kementerian data yang masuk ada 173 perusahaan yang dilaporkan belum membayar THR. Kalau masyarakat yang memberikan pengaduan jumlahnya ada 305 orang," ujar Joao usai acara Jabar Punya Informasi (Japri) di Gedung Sate, Selasa (26/4).

Joao menjelaskan, di Jabar sendiri jumlah perusahaannya ada 73 ribu. Pada 173 perusahaan yang dilaporkan, pihaknya mengambil langkah dan komunikasi dengan berkoordinasi bersama Disnakertrans di daerah. Yakni, melakukan preventif dan pembinaan bipartit perusahaan dan pekerja. "Tapi kalau perusahaan nggak bayar dan kami nggak patuh nanti akan kami turunkan pengawas untuk lakukan pemeriksaan," katanya.

Karena, kata dia, semua tahu bahwa pembayaran atau tidak membayar THR itu normatif dan ada sanksi administratif. Seharusnya, sejak 25 April 2022 kemarin itu batas terakhir perusahaan membayar karena itu masuk H-7. "Bahkan mestinya hari ini kedepan harus ada pemeriksaan apabila memang

nggak patuh," katanya.

Joao mengaku, tahun ini memang ada kenaikan jumlah perusahaan yang tidak membayar THR. Karena, pada 2021 lalu hanya 148 perusahaan yang dilaporkan. Tapi, tahun ini sudah 173. Bahkan, jumlahnya bisa bertambah.

"Kemarin kan yang dilaporkan ada 148. Nah sekarang naik untuk posisi hari ini saja sudah 173 perusahaan. Padahal setiap saat data berkembang dan kita update terus. Artinya kemarin kalau udah 173 maka ada peningkatan soal pengaduan," katanya.

Menurut Joao, data tersebut memang diambil dari pengaduan lewat website. Jadi, pihaknya harus memverifikasi dan dipilah mana yang pengaduan benar atau hanya iseng. "Karena ada juga pengaduan yang masuk semacam iseng. Ini kita harus pilah dan identifikasi. Data sendiri sudah diserahkan ke kabupaten kota," katanya.

Selain lewat web, kata dia, pengaduan pun diterima lewat Posko THR yang tersebar di UPTD di kab/kota. Menurutnya, di setiap Posko tersebut ia selalu mengarahkan agar sejak dini kalau ada persoalan dan ada aduan segera ditindaklanjuti.

"Posko THR ada di lima UPTD yakni, Bogor, Karawang, Cirebon, Kota Bandung dan Garut. Itu posko yang memang disediakan dan termasuk di provinsi bisa ngadu," katanya. Menurutnya, hingga saat ini pengaduan soal perusahaan yang belum membayar THR itu banyaknya dilaporkan dari daerah kawasan industri. Misalnya, Bekasi, Karawang dan lainnya. ● **pra**

Keluarga Ujang Sarjana dan Pedagang Pasar Bogor Sepakat Damai

BOGOR (IM)-Kasus keributan antarpedagang di Pasar Bogor menemui jalan damai. Pihak Ade Komeng dan Andriansyah yang menjadi korban Ujang Sarjana menyatakan islah.

Kesepakatan damai antara pihak Ujang Sarjana dengan Ade Komeng dan Andriansyah disampaikan langsung oleh Kapolda Jawa Barat, Irijen Suntana di Mapolresta Bogor Kota.

"Hari ini saya mendapat berkah yang luar biasa, kami semua mendapat berkah yang luar biasa, hari ini kami menerima atau mendapat islah atau damai antara keluarga Pak Ujang dengan Kang Komeng, Andriansyah dan yang lainnya, dan saya merasa ini berkah dan Allah SWT di bulan Ramadan," kata Irijen Suntana, Selasa (26/4).

Suntana menyebut hasil kesepakatan damai tersebut akan dibawa ke pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Bogor dan Pengadilan Negeri (PN) Bogor untuk pertimbangan hukum.

"Hari ini, keduanya telah menyampaikan kata sepakat untuk islah, dan mudah-mudahan islah yang dilakukan hari ini akan kita bawa ke Kejaksaan dan Pengadilan untuk menjadi pertimbangan dalam proses penegakan hukum," kata Suntana.

Seperti diketahui, saat ini Ujang Sarjana masih menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Bogor. Dari informasi dihimpun, Ujang Sarjana dijadwalkan akan menjalani

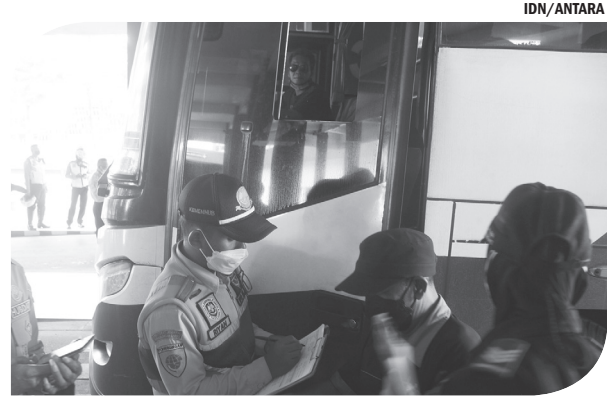
sidang pekan depan dengan agenda persenturan sela.

Sementara itu, Andriansyah, salah satu korban pengeroyokan Ujang Sarjana cs, mengaku telah memaafkan apa yang dilakukan Ujang Sarjana dan rekan-rekannya. Ia akan melupakan kejadian tersebut.

"Alhamdulillah saya pribadi dari pihak keluarga Ade Komeng maupun saya, telah memaafkan kejadian itu dan melupakannya. Dan saat ini kami sepakat berdamai dan kebetulan juga di momen ini bulan Ramadan, semoga ini jadi kabar baik," kata Andriansyah di Mapolresta Bogor Kota.

Hal serupa diungkap Ade Komeng. Ia yang menjadi sasaran pengeroyokan mengaku sudah memaafkan Ujang Sarjana cs. "Dengan kejadian ini saya sungguh prihatin, cuma intinya ke depannya lebih baik dan maju, dan juga saya dengan keluarga Ujang (Ujang Sarjana) sudah memaafkan beliau dan juga untuk ke depan lebih baik lagi," katanya.

Kasus Ujang Sarjana mencuat setelah dua keponakannya mengadu secara langsung kepada Presiden Jokowi di Pasar Bogor pada Kamis (21/4) lalu. Saat itu, Jokowi sedang melakukan kunjungan dan membagikan BLT Minyak Goreng dan BMK bagi masyarakat di Pasar Bogor. Saat itu keponakanan Ujang Sarjana berteriak histeris saat mengadu ke Jokowi. ● **gio**



IDN/ANTARA

PEMERIKSAAN KESEHATAN PENGEMUDI BUS

Petugas meminta pengemudi bus untuk mengikuti pemeriksaan kandungan obat dari urin saat tes kesehatan di Terminal Tirtonegoro Solo, Jawa Tengah, Selasa (26/4). Pemeriksaan tersebut untuk mengetahui kadar obat-obatan dalam tubuh dan memastikan kondisi kesehatan pengemudi bus guna mencegah terjadinya kecelakaan selama musim mudik dan arus balik Lebaran 2022.

Ini Skenario Hadapi Kepadatan Puncak Bogor saat Libur Lebaran

BOGOR (IM)-Kawasan Puncak, Kabupaten Bogor masih menjadi destinasi wisata masyarakat pada libur Lebaran 2022. Puncak diperkirakan dipadati wisatawan sesudah Hari Raya Idul Fitri.

Untuk menghadapi kepadatan atau kemacetan, polisi sudah menyiapkan skenario. Kapolda Jawa Barat, Irijen Pol Suntana mengatakan, skenario itu seperti rekayasa lalu lintas yang akan dilakukan situasional tergantung kondisi di lapangan. Rekayasa ini untuk memberikan kenyamanan dan kelancaran masyarakat berlalu lintas.

"One way. Ganjil genap kalau di Puncak dikenal one way. One way panjang akan kita lakukan apabila kepadatannya terlalu besar. Tapi, itu jalan

terakhir yang akan kita lakukan. Kalau arusnya masih bisa dikendalikan lancar, roda berputar mungkin rekayasa lintas tidak kita lakukan," ujarnya di Pos Polisi Simpang Gadog, Kabupaten Bogor, Selasa (26/4).

Untuk persiapan sarana dan prasarana di wilayah Kabupaten Bogor, dia menilai sudah baik termasuk dalam rangka koordinasi dengan wilayah perbatasan. "Dan persiapan CCTV, personel yang akan dilakukan situasional tergantung kondisi di lapangan. Rekayasa ini untuk memberikan kenyamanan dan kelancaran masyarakat berlalu lintas. Hampir 25 Pospam, Pospay, dan salah satunya kita berdiri pos terpadu Kabupaten Bogor yang ada di Gadog," ungkapnya. ● **gio**

8 | Nusantara



IDN/ANTARA

HARI KESIAPSIAGAAN BENCANA NASIONAL DI LERENG MERAPI

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memberi sambutan pada kegiatan peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional di Balebante, Kemalang, Klaten, Jawa Tengah, Selasa (26/4). Selain memperingati Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, kegiatan tersebut bertujuan untuk memperkuat masyarakat dalam menerapkan evakuasi mandiri saat menghadapi bencana erupsi Gunung Merapi.

TAK KUNJUNG RAMPUNG

Komisi V DPR akan Tinjau Kembali Proyek Pembangunan Bendungan Sukamahi dan Ciawi

Proyek Bendungan Sukamahi dan Bendungan Cipayang diharapkan segera tuntas, karena bisa membantu mengendalikan banjir di DKI Jakarta.

MEGAMENDUNG

(IM)-Komisi V DPR RI akan meninjau kembali megaprojek pembangunan Bendungan Sukamahi dan Bendungan Ciawi (Cipayang), Kabupaten Bogor yang bernilai lebih dari Rp3 triliun.

Hal itu karena, proyek Bendungan Sukamahi dan Bendungan Ciawi yang sesuai kontrak awal harus selesai di Bulan Juni Tahun 2019 lalu diberikan kompensasi waktu hingga Bulan Juli Tahun 2020 tersebut tidak juga rampung

dikerjakan.

Dari informasi yang dihimpun, proyek pembangunan Bendungan Sukamahi dikerjakan oleh PT. Wijaya-Basuki KSO. Sedangkan proyek pembangunan Bendungan Ciawi (Cipayang) dikerjakan oleh PT. Abipraya Sacna KSO.

Jika, Bendungan Sukamahi memiliki luas 49,82 hektare, maka Bendungan Ciawi (Cipayang) memiliki luas 90,19 hektare. Masing-masing bendungan tersebut bisa menampung

air sebesar 1,68 juta kubik dan 6,4 juta.

Untuk Kecamatan Megamendung luas lahan untuk dua bendungan tersebut, di Desa Sukamahi sebesar 11,19 hektare, Desa Gadog 12,94 hektare, Desa Sukamaju 3,32 hektare, Desa Sukakarya 19,11 hektare, Desa Cipayang 31,74 hektare, Desa Gadog 25,05 hektare dan Desa Sukakarya 11,59 hektare.

Sedangkan untuk wilayah Kecamatan Cisarua, hanya Desa Kopo yang lahannya digunakan untuk pembangunan Bendungan Ciawi (Cipayang) yaitu seluas 10,32 hektare.

"Komisi V DPR RI akan meninjau kembali proyek yang seharusnya dua tahun lalu rampung pekerjaannya, usai liburan Hari Raya Idul Fitri,

kami akan menanyakan ada kendala apa? Sehingga PT. Wijaya-Basuki KSO dan PT. Abipraya Sacna KSO terlambat atau molor pekerjaannya," ucap anggota Komisi V DPR RI, Eddy Santana Putra kepada wartawan, Selasa (26/4).

Politisi Partai Gerindra ini berharap proyek pembangunan Bendungan Sukamahi dan Bendungan Ciawi (Cipayang) bisa tuntas pekerjaannya seperti pembangunan Bendungan Bintang Bano, Bendungan Randu Guntung, Bendungan Tukul, Bendungan Pidekso dan lainnya.

"Kami harap proyek Bendungan Sukamahi dan Bendungan Cipayang segera tuntas, lalu diresmikan, hal itu karena bisa membantu mengendalikan banjir di DKI Jakarta

dan juga agar tidak ada lagi ikan yang mati karena material tanah proyek bendungan tersebut yang terbawa air hingga air Sungai Ciliwung menjadi keruh," harapnya.

Eddy menuturkan bahwa pembangunan Bendungan Sukamahi dan Bendungan Ciawi (Cipayang) tidak cukup dalam upaya mengendalikan banjir di DKI Jakarta, perlu upaya lain yaitu pembangunan sumur resapan dan pengembalian fungsi daerah aliran sungai (DAS) Ciliwung.

"Perlu pembangunan sumur resapan dan pengembalian fungsi DAS Ciliwung dari wilayah hulu hingga hilir, Pemprov DKI Jakarta harus membantu pemerintah pusat dan Pemkab Bogor, terutama dari sisi bantuan keuangan atau anggaran," tutur Eddy. ● **pra**

Dukung Akselerasi Digitalisasi Kesehatan, Leap Hadirkan Antares

BANDUNG (IM)-Sebagai perusahaan telekomunikasi digital terdepan di Indonesia, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) berkomitmen untuk berkontribusi menjadi tulang punggung ekonomi digital Indonesia dengan beragregasi inovasi terbaik yang berkelanjutan di berbagai sektor.

Dalam upaya mendukung terwujudnya ekonomi digital Indonesia, Telkom melalui Leap-Telkom Digital (Leap) terus menghadirkan berbagai produk dan layanan digital untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Salah satunya dengan menghadirkan ANTARES sebagai layanan penyedia resource platform pengembangan teknologi Internet of Things (IoT). ANTARES merupakan umbrella brand yang terdiri dari tiga pilar, yaitu ANTARES Platform, ANTARES Connectivity, dan ANTARES Solutions.

ANTARES hadir sebagai Internet of Things (IoT) enabler, yaitu end to end solution untuk mengatasi berbagai permasalahan bisnis dari sisi IoT. ANTARES adalah bagian dari Leap yang merupakan umbrella brand produk dan layanan digital Telkom untuk akselerasi digitalisasi masyarakat Indonesia.

Leap diluncurkan secara resmi pada Maret 2022 yang lalu. Dengan adanya Leap, diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekosistem digital di Indonesia demi akselerasi terwujudnya kedaulatan digital nasional, sejalan dengan target pemer-

intah dalam beberapa tahun mendatang.

Leap melalui ANTARES secara aktif mendukung digitalisasi di ekosistem kesehatan salah satunya melalui kerja sama dengan dua BUMN di sektor kesehatan, yaitu Kimia Farma dan Bio Farma.

Kerja sama ANTARES dengan Kimia Farma hadir dalam bentuk smart manufacturing, di mana ANTARES mengembangkan sistem power monitoring, environment monitoring, dan real-time machine monitoring. Melalui pengadopsian sistem IoT ini, dapat meningkatkan efisiensi produksi dan menghemat biaya produksi.

ANTARES juga bekerja sama dengan Bio Farma dalam pendistribusian vaksin, terutama distribusi hingga ke daerah terpencil. Melalui kerja sama ini dapat menjamin terpenuhinya stok vaksin dengan tujuan untuk menekan kasus, yang pada akhirnya dapat berkontribusi dalam penurunan angka kasus covid di Indonesia.

Sebagai salah satu layanan unggulan Leap, kualitas ANTARES telah diakui secara nasional maupun internasional dan telah memenuhi regulasi yang ditetapkan Kementerian Komunikasi Informatika (Kominfo) terkait penyimpanan data di Indonesia serta telah tersertifikasi secara internasional oleh lembaga OneM2M.

Standar OneM2M menjadikan ANTARES sebagai platform horizontal IoT yang dapat menginte-

grasikan berbagai komponen IoT, memungkinkan aplikasi IoT dapat berinteraksi dengan data dari perangkat IoT di seluruh solusi vertikal industri yang berbeda, tanpa mengesampingkan keamanan pengguna atau pelanggan yang menggunakannya.

Pelanggan juga dapat melakukan visualisasi data secara sederhana dengan fitur widget.

Direktur Digital Business Telkom, Muhamad Fajrin Rasyid, mengatakan bahwa Telkom melalui Leap melihat IoT menjadi salah satu ekosistem yang sangat potensial dan pasar IoT di Indonesia masih akan semakin berkembang.

"Oleh karena itu, kami mengembangkan ANTARES dengan harapan di masa datang akan menjadi platform yang dapat memberikan jawaban dan solusi untuk kebutuhan IoT.

Langkah ini kami mulai dengan berkolaborasi dengan berbagai pihak, dua di antaranya adalah dengan Kimia Farma dan Bio Farma. Harapan kami, kedepannya ANTARES dapat digunakan oleh lebih banyak kalangan", ujar Fajrin.

Ke depannya, Leap melalui ANTARES berencana untuk mengembangkan Center of Excellence untuk Research and Development IoT di Indonesia dan membuka kolaborasi untuk memperkuat coverage, capability, serta capacity bersama. Untuk informasi lebih lanjut, dapat mengakses <https://leap.digitalbisa.id/>. ● **lys**



IDN/ANTARA

PERSIAPAN JELANG ARUS MUDIK DI JALUR PUNCAK BOGOR

Petugas mendirikan posko Dinas Kesehatan, Kabupaten Bogor di Pos Polisi Simpang Gadog, Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (26/4). Berbagai persiapan seperti mendirikan posko kesehatan dan gerai vaksinasi terus dilakukan menjelang arus mudik Lebaran di jalur Puncak, Kabupaten Bogor.

Bupati Bogor Larang ASN Terima Gratifikasi Lebaran

BOGOR (IM)-Bupati Bogor, Ade Yasin secara tegas melarang jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) menerima segala bentuk gratifikasi lebaran atau alasan penangan Covid 19. Larangan tersebut diperkuat dengan ditandatangani Surat Edaran Bupati Bogor, tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian gratifikasi Terkait Hari Raya.

Dalam surat edaran tersebut, secara tegas, Ade Yasin melarang pejabat, Aparatur Sipil Negara (ASN), pimpinan dan karyawan BUMD dengan tidak melakukan permintaan, pemberian, dan penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, wajib melaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi.

"Permintaan dana atau hadiah sebagai Tunjangan Hari Raya (THR) atau dengan sebutan lain oleh Pejabat dan Aparatur Sipil Negara (ASN)/karyawan BUMD, baik secara individu maupun mengatasnamakan institusi kepada masyarakat, perusahaan, secara tertulis maupun tidak tertulis, merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi," jelas Ade.

Bupati Ade Yasin juga meminta, pejabat dan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan lainnya, serta pimpinan dan karyawan BUMD wajib menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dengan tidak melakukan permintaan, pemberian, dan penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Jajarannya juga dilarang memanfaatkan kondisi pandemi Corona virus Disease 2019 (Covid-19) atau perayaan hari raya untuk melakukan perbuatan atau tindakan korupsi.

"Tindakan tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan atau kode etik, dan memiliki risiko sanksi pidana," kata Ade Yasin, di Cibinong, Senin (25/4).

Ade Yasin menjelaskan, Berdasarkan ketentuan Pasal 12 B dan Pasal 12 C Undang-Undang Nomor

20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Isinya, Aparatur Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai BUMD apabila menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, wajib melaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi.

"Permintaan dana atau hadiah sebagai Tunjangan Hari Raya (THR) atau dengan sebutan lain oleh Pejabat dan Aparatur Sipil Negara (ASN)/karyawan BUMD, baik secara individu maupun mengatasnamakan institusi kepada masyarakat, perusahaan, secara tertulis maupun tidak tertulis, merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi," jelas Ade.

Bupati Ade Yasin juga meminta, pejabat dan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan lainnya, serta pimpinan dan karyawan BUMD wajib menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dengan tidak melakukan permintaan, pemberian, dan penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Jajarannya juga dilarang memanfaatkan kondisi pandemi Corona virus Disease 2019 (Covid-19) atau perayaan hari raya untuk melakukan perbuatan atau tindakan korupsi.

"Tindakan tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan atau kode etik, dan memiliki risiko sanksi pidana," kata Ade Yasin, di Cibinong, Senin (25/4).

Ade Yasin menjelaskan, Berdasarkan ketentuan Pasal 12 B dan Pasal 12 C Undang-Undang Nomor

Amankan Pemudik, Polisi Siagakan Penembak Jitu

BANDUNG (IM)-Guna mengantisipasi tindak kejahatan dan memberikan rasa aman kepada para pemudik, Polda Jabar menempatkan penembak jitu di jalur mudik. "Kita siapkan (penembak jitu), penggunaannya tidak langsung stand by di tempat. Intinya di tempat-tempat yang dimungkinkan rawan atau rawan kejahatan keras," ucap Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Ibrahim Tompo, saat dihubungi via ponselnya Selasa (26/4).

Ibrahim menuturkan selain penembak jitu, pihaknya juga akan menurahkan personel penjagaan tertutup atau polisi berpakaian

preman, di titik rawan aksi kejahatan. "Salah satu permasalahan Kamtibmas yang muncul itu ada teroris dan curas dan kejahatan tingkat tinggi makanya kita siapkan juga personel dan juga perangkat yang bisa mengantisipasi kondisi tersebut," katanya.

Lebih lanjut, Ibrahim mengatakan, pihaknya juga bakal menyiapkan pengamanan pada malam takbiran Idul Fitri. Sejumlah personel disiapkan untuk menjaga kondusifitas di tempat ibadah. "Ya, jadi kalau misalnya di tempat ibadah itu kan nanti ada screening dari Den-sus dan Brimob nanti disiagakan," kata dia. ● **pra**